



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**LAPORAN RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)
MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.**

Tahun sidang	: 2013/2014
Masa Persidangan	: III (Ketiga)
Rapat Ke-	: 1 (satu)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka.
Hari/Tanggal	: Selasa-Rabu, 6 - 7 Mei 2014.
W a k t u	: Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Pimpinan Rapat	: H. Purwanto, S.IP. (Ketua Panja DPRD Kab. Batang)
Acara	: Rapat Kerja Panja membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013.
Hadir	: Anggota Panja DPRD Kabupaten Batang dan Tim Tindak Lanjut LHP (sebagaimana daftar hadir terlampir)

I. PENDAHULUAN

Dasar :

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat - Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun sidang 2013-2014 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2014;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka Pembahasan LHP BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

II. MATERI YANG DIBAHAS :

Surat dari BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah tanggal 23 April 2013 Nomor : 96/B/LHP/XVIII.SMG/04/2014 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013, terdiri dari :

1. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
2. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

III. HASIL PEMBAHASAN.

A. Kesimpulan.

Setelah Panja mencermati materi LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang Tahun 2013, dan menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Tim Tindak Lanjut Pemerintah Daerah, serta memperhatikan saran dan masukan peserta rapat, maka Panja berkesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan-temuan yang ada dalam LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Batang seluruhnya bersifat administratif.
2. Ada beberapa temuan berulang pada SKPD yang sama, hal ini mengindikasikan tidak adanya evaluasi dan monitoring dari Bupati, Sekda maupun pimpinan SKPD.
3. Kurang cermatnya SKPD-SKPD dalam perencanaan anggaran sehingga banyak kegiatan pembangunan yang "mangkak" tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
4. Tidak adanya kemauan dan kedisiplinan SKPD-SKPD untuk menuju opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK-RI.
5. Inspektorat supaya melaksanakan evaluasi program/kegiatan tahun 2013 yang tidak selesai pembangunannya.

B. Saran

1. Agar action plan yang telah dibuat oleh Tim Tindak Lanjut, benar-benar dilaksanakan dan dimonitor oleh Inspektorat.
2. Sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD, agar action plan nantinya dijadikan bahan untuk pendalaman bagi Komisi-Komisi DPRD atas tindak lanjut LHP BPK-RI.
3. Pemberian kesejahteraan bagi karyawan RSUD agar dicarikan payung hukumnya, namun apabila tidak ada payung hukumnya untuk segera mengembalikan anggaran tersebut ke Kasda.
4. Kedepan untuk meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK-RI, hendaknya SKPD-SKPD mempunyai kedisiplinan terkait penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.

C. Rekomendasi


1. Terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum dapat diselesaikan atau "mangkak", untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu, sebelum mengajukan kegiatan-kegiatan baru.
2. DPRD tidak akan menyetujui anggaran kegiatan baru, apabila belum diselesaikannya kegiatan pembangunan Tahun 2013 yang "mangkak".
3. Rekomendasi dari BPK-RI menjadi satu kesatuan dari rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Raker Panitia Kerja DPRD Kabupaten Batang membahas LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah atas LKPD Kabupaten Batang Tahun 2013. Selanjutnya Panja sepakat meminta melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Batang untuk segera menetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD dalam rangka pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang atas pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2013.

Batang, 7 Mei 2014

PANITIA KERJA (PANJA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Ketua Rapat,


H. PURWANTO, S.IP